

	News Title : Bappebti Bocorkan Progres Aturan Bursa Berjangka CPO	
	Media Name : Tirta.id	Journalist : Hanif Reyhan Ghifari
	Publish Date : 05 July 2023	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Olvy Andrianita (Sekretaris Bappebti), Farid Amir (Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Ditjen Daglu Kemendag)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Bisnis	Topic : Bursa CPO

[Home](#) > [Bisnis](#)

Bappebti Bocorkan Progres Aturan Bursa Berjangka CPO



Nelaya mengangkut kelapa sawit di Desa Hujung Harung, Kabupaten Kota Bharu, Johor, Malaysia. (21/12/2022). (JST/AN/News/My)



Reporter: Hanif Reyhan Ghifari, email: h.14.2023@tirta.idEditor: Nurul Zakiyah

Bappebti menuliskan Ketersediaan narasumber akan melakukan harmonisasi Permenyang terkait bursa berjangka CPO

SINAR – Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terus memantapkan persiapan pembentukan Bursa CPO Crude Palm Oil (CPO) nasional. Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita mengatakan, pihaknya telah melakukan konsultasi publik dengan pelaku usaha, asosiasi, dan pemerintah dari Kementerian Perdagangan dan Industri Indonesia (Kadiri) terkait rancangan Peraturan Menteri Perdagangan (Permenperdag).

“Jadi semua masalah pelaku usaha, kita coba dari industri itu lah dituangkan di dalam Permenperdag atau rancangan Permenperdag, atau Perda (peraturan Bappebti) ataupun di peraturan lainnya”, katanya ketika dihubungi **Tirta**, Jakarta, Rabu (5/7/2023).

Olvy menjelaskan rancangan Permenperdag saat ini sedang dalam proses tahap hukum. Nantinya, Kementerian akan melakukan harmonisasi. Dia mengatakan, harmonisasi penting agar regulasi yang diterbitkan menjadi harmonis atau tidak tumpang tindih dengan suatu peraturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah atau sejajar satu sama lainnya.

“Kalau terkait hal-hal yang karena itu akan komoditi yang strategis dan hal-hal yang orang banyak juga sangat penting, sehingga kita betul-betul ingin pastikan semuanya baik”, bebernya.

Untuk diketahui sebelumnya, Bappebti memperingatkan kegiatan konsultasi publik melalui Bursa Berjangka di Indonesia yang diselenggarakan di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (26/6/2023). Acara dipimpin Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita mewakili Pn Kepala Bappebti dan dihadiri para perwakilan kepentingan sektor kelapa sawit, di antaranya pelaku usaha, asosiasi, dan juga perwakilan dari Kementerian Perdagangan dan Industri Indonesia (Kadiri).

“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut konsultasi publik yang dipimpin Menteri Perdagangan pada 3 Juni 2023 lalu. Banyak masukan dan perhatian yang disampaikan pelaku usaha dalam kegiatan tersebut, sehingga kami kembali mengadakan konsultasi publik lanjutan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait rancangan kebijakan yang sedang disusun”, kata Pn Kepala Bappebti Iy Karmu.

Iy Karmu menjelaskan, ekspor CPO melalui bursa berjangka diharapkan dapat meningkatkan harga CPO yang akurat serta sejalan dengan arah pasar internasional. Berdasarkan data Bursa Berjangka Indonesia yang dirilis pada 15/06/2023, harga CPO di Bursa Berjangka Indonesia mencapai Rp11.110,00 per ton.

Dalam aturan itu dijelaskan salah satu tujuan PSK yaitu sebagai sarana pencapaian harga (price discovery) dan pembentukan harga acuan (price reference) yang transparan. Dia menjelaskan nantinya, bursa CPO yang diawasi pemerintah harus beroperasi, baik di pasar domestik maupun internasional.

Selain itu, juga mampu memberikan layanan yang optimal kepada pelaku usaha. Bapebti berharap CPO di bursa juga mampu bersaing atau minimal sama dengan biaya transaksi CPO yang dilakukan selama ini oleh pelaku usaha Indonesia di Bursa Malaysia.

Dia juga berharap kebijakan yang akan dijalankan dapat diimplementasikan dengan mempertimbangkan bentuk jangka panjang (long term contract) dan modal dalam perdagangan. Selanjutnya, diperlukan penelitian dan validasi terkait data yang akan digunakan untuk melakukan transaksi di bursa berjangka CPO.

Konsep Rancangan Peraturan Bappebti tentang Bursa Berjangka

Dalam kegiatan konsultasi tersebut juga dilakukan sesi pemersapan yang diinisiasi oleh Ketua Tim Kerja Bappebti Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam pertemuan tersebut menjelaskan paparan konsep Rancangan Peraturan Bappebti tentang Peraturan Teknis Pelaksanaan Perdagangan Pasar Fisik untuk Ekspor CPO di Bursa Berjangka dan paparan konsep Peraturan Tata Tertib (TTT) Bursa untuk Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita.

Sementara itu, Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Ditjen Daglu) Farid Amir mengatakan terkait konsep Rancangan Permenperdag dan Bappebti Ekspor CPO melalui Bursa Berjangka.

Dalam paparannya dia menjelaskan ekspor melalui bursa berjangka komoditi hanya akan mengacu CPO dengan HS 15119000 dan tidak termasuk produk turunanannya. Hal itu sejalan dengan CPO untuk ekspor yang tidak terikat, sehingga saat implementasi tidak menimbulkan persoalan yang terlalu besar.

“Selain itu, pihak yang berhak melakukan ekspor adalah Eksporir Terdaftar (ET) dan memiliki Hak Ekspor (HE) yang diperoleh dari pemenuhan asas kebijakan Domestik Harmonis (Dohar) yang dibuat dari pihak yang mengizinkan HE atau pemenuhan Dohar” ujar Farid.

Farid juga menjelaskan, alur bisnis proses dari kebijakan ekspor CPO melalui bursa berjangka tidak ada perubahan yang signifikan. Pada kebijakan ini ada penempatan satu proses sebelum ekspor yaitu melalui ekspor CPO, yaitu harus direalisasikan di bursa berjangka, kemudian diterbitkan bukti pembelian CPO oleh bursa.

Lebih lanjut, dia menuliskan bukti pembelian tersebut merupakan dokumen yang akan digunakan dalam pemenuhan Perizinan Ekspor (PE). Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita menjelaskan Rancangan Peraturan Bappebti dan Rancangan Peraturan tentang Bursa Berjangka.

Dia menjelaskan Rancangan Peraturan Bappebti tentang Peraturan Teknis Perdagangan Pasar Fisik untuk Ekspor CPO mengacu pada ketentuan Bursa CPO dan lembaga keuangan CPO, tata cara perdagangan di Bursa CPO, Laku, mekanisme pengawasan oleh Bappebti dan Bursa CPO.

Kemudian mekanisme penyelesaian perselisihan dan forum arbitrase. Lebih lanjut, dia menjelaskan Peraturan Tata Tertib (TTT) ekspor CPO melalui bursa berjangka berarti ketentuan dalam teknis yang mencakup persyaratan dan tata cara penempatan peserta perdagangan, pembelian, baik dari pembelian peserta perdagangan pembeli, jenis jaminan transaksi, mekanisme pengawasan, mekanisme penyelesaian sengketa CPO dan forum arbitrase.

“Dalam prosesnya, ketiga kebijakan/ketentuan teknis tersebut harus komprehensif dan terintegrasi sehingga perlu memperhatikan masalah dari para pemangku kepentingan. Kebijakan ekspor CPO juga harus sejalan dengan kebijakan pemenuhan kebutuhan CPO dalam negeri, sehingga tidak memberikan pelaku usaha”, terang Olvy.

Baca juga:
Bappebti undi Progres Bursa Sawit: Masih Tidak Pasti
Bappebti Optimalisasi Bursa Sawit Indonesia Sep 2023, Jari 2023

Baca juga:
Bursa Sawit terkait Bursa Sawit atau bukan menurut Menteri Perdagangan
Grafik
(Grafik - Bisnis)

Reporter: Hanif Reyhan Ghifari
Penulis: Hanif Reyhan Ghifari
Editor: Inan Umbi Pribadi